



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 227/SK-BUP/HK/2021

TENTANG

KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka dilakukan evaluasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan (*job value*) yang selanjutnya digunakan dalam penentuan kelas jabatan (*job class*), sehingga pemerintah daerah memiliki pola dan standar dalam penyusunan peringkat jabatan pegawai negeri sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 7511 Kalimantan Timur  
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor : B/214/M.SM.04.00/2018 tanggal 22 Februari 2019 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Notulen dan Berita Acara Pembahasan hari Senin, 28 Desember 2020 dengan Tim Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja; dan
  3. Telaahan Staf tanggal 15 Januari 2021, perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Keputusan Bupati tentang Standar Rumpun dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelas Jabatan, wajib dipedomani dalam pemberian tunjangan/tambahan penghasilan pegawai yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan;
- KETIGA** : Kelas Jabatan wajib digunakan oleh Tim Penilai Kinerja dalam proses Manajemen Aparatur Negara di Perangkat Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Juni 2021

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**EDI DAMANSYAH**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 227/SK-BUP/HK/2021, TANGGAL 22 JUNI 2021  
 TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KUTAI KARTANEGARA

I. REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAN PEGAWAI

NO.	KELAS JABATAN	PERSEDIAN PEGAWAI
1	2	3
1.	15	1
2.	14	35
3.	13	3
4.	12	104
5.	11	2283
6.	10	55
7.	9	2155
8.	8	2595
9.	7	1550
10.	6	3011
11.	5	1313
12.	4	2
13.	3	115
14.	2	0
15.	1	37
JUMLAH		13.259

II. NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAN PEGAWAI

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSEDIAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	1	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	1	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	1	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	1	
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	12	1	
6.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	1	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM	12	1	
8.	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA	12	1	
9.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	12	1	
10.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	1	
11.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	1	
12.	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	12	1	
13.	KEPALA BAGIAN UMUM	12	1	
14.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	1	

15.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	1	
16.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	12	1	
17.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	9	1	
18.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9	1	
19.	KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	9	1	
20.	KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	9	1	
21.	KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	9	1	
22.	KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9	1	
23.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1	
24.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	9	1	
25.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	8	1	
26.	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI	9	1	
27.	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	8	1	
28.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI KERJA SAMA	8	1	
29.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	9	1	
30.	KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	9	1	
31.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	8	1	
32.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	1	
33.	KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM	9	1	
34.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1	
35.	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	1	
36.	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	9	1	
37.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	9	1	
38.	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	1	

39.	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	1	
40.	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR	9	1	
41.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	9	1	
42.	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	9	1	
43.	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	8	1	
44.	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	9	1	
45.	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	9	1	
46.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN	8	1	
47.	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	9	1	
48.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	9	1	
49.	KEPALA SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	9	1	
50.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	9	1	
51.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	8	1	
52.	KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN	9	1	
53.	SEKRETARIS DEWAN	14	1	
54.	KEPALA BAGIAN UMUM	12	1	
55.	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	12	1	
56.	KEPALA BAGIAN FASILITAS DAN PENGAWASAN PENGANGGARAN	12	1	
57.	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN	12	1	
58.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
59.	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	8	1	
60.	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	9	1	
61.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	9	1	
62.	KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI	8	1	
63.	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	8	1	
64.	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	9	1	
65.	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	9	1	

66.	KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA DAN ASPIRASI	9	1	
67.	KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	8	1	
68.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1	
69.	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS,PROTOKOL DAN PUBLIKASI	9	1	
70.	INSPEKTUR	14	1	
71.	SEKRETARIS	12	1	
72.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM,KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	9	1	
73.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
74.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1	
75.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	1	
76.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	1	
77.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	1	
78.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	11	1	
79.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	1	
80.	SEKRETARIS	12	1	
81.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TATALAKSANA	8	1	
82.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
83.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
84.	KEPALA BIDANG PAUD, PNFI	11	1	
85.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	11	1	
86.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SMP	11	1	
87.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	11	1	
88.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	0	
89.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN MUTU PAUD DAN PNFI	8	1	
90.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNFI	9	1	
91.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PAUD DAN PNFI	9	1	
92.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN SD	8	1	
93.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR	9	1	

94.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SD	8	1	
95.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN MUTU SMP	9	1	
96.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	9	1	
97.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMP	8	1	
98.	SEKSI PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNFI	9	1	
99.	SEKSI PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	9	1	
100.	SEKSI PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	9	1	
101.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA DAERAH	9	1	
102.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DAN BUDAYA DAERAH	8	0	
103.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	8	1	
104.	KEPALA DINAS SOSIAL	14	1	
105.	SEKRETARIS	12	1	
106.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TATALAKSANA	9	1	
107.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
108.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
109.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	11	1	
110.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	0	
111.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	11	0	
112.	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	11	0	
113.	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	9	1	
114.	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	9	1	
115.	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	9	1	
116.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA	9	0	
117.	KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA	9	1	
118.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN DAN KELUARGA	9	1	

119.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	9	1	
120.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	9	1	
121.	KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS	9	1	
122.	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN SOSIAL	8	1	
123.	KEPALA SEKSI BANTUAN STIMULAN DAN FAKIR MISKIN	8	1	
124.	KEPALA DINAS KESEHATAN	14	1	
125.	SEKRETARIS	12	1	
126.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
127.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	9	1	
128.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
129.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	1	
130.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	11	1	
131.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	11	1	
132.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	0	
133.	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR	9	1	
134.	KEPALA SEKSI KESEHATAN RUJUKAN	8	1	
135.	KEPALA SEKSI REGULASI DAN PENINGKATAN MUTU	9	1	
136.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	9	1	
137.	KEPALA SEKSI SURVEILANS, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN KEADAAN LUAR BIASA	9	1	
138.	KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN	9	1	
139.	KEPALA SEKSI DATA INFORMASI KESEHATAN	8	1	
140.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	9	1	
141.	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	8	1	
142.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYAR AKAT DAN PROMOSI KESEHATAN	9	1	
143.	KEPALA SEKSI PENYEHATAN KELUARGA	9	1	
144.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN GIZI KELUARGA DAN MASYARAKAT	8	1	



145.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	14	1	
146.	SEKRETARIS	12	1	
147.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
148.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
149.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
150.	KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	1	
151.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	11	1	
152.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	11	1	
153.	KEPALA BIDANG TEKNIS	11	1	
154.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	9	1	
155.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN	8	1	
156.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	8	1	
157.	KEPALA SEKSI BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	8	1	
158.	KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG	8	1	
159.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG	9	1	
160.	KEPALA SEKSI IRIGASI	9	1	
161.	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN SUNGAI, DANAU WADUK, RAWA DAN PANTAI	9	1	
162.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN IRIGASI	8	1	
163.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	9	1	
164.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	8	1	
165.	KEPALA SEKSI INVENTARISASI DAN PELAPORAN	8	1	
166.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	1	
167.	SEKRETARIS	12	1	
168.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
169.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
170.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
171.	KEPALA BIDANG PROMOSI, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN INVESTASI	11	1	
172.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN ADVOKASI	11	1	
173.	KEPALA BIDANG PELAYANAN ELEKTRONIK	11	1	

174.	KEPALA BIDANG FASILITASI PELAYANAN	11	1	
175.	KEPALA SEKSI PROMOSI	9	1	
176.	KEPALA SEKSI KERJASAMA	9	1	
177.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI	9	1	
178.	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN	9	1	
179.	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PEMBINAAN	9	1	
180.	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN ADVOKASI	9	1	
181.	KEPALA SEKSI PELAYANAN ELEKTRONIK SEKTOR KESRA DAN EKONOMI	8	0	
182.	KEPALA SEKSI PELAYANAN ELEKTRONIK SEKTOR PEMBANGUNAN	8	1	
183.	KEPALA SEKSI DATA DAN PENGEMBANGAN APLIKASI	9	1	
184.	KEPALA SEKSI FASILITAS PELAYANAN I	9	1	
185.	KEPALA SEKSI FASILITAS PELAYANAN II	9	1	
186.	KEPALA SEKSI FASILITAS PELAYANAN III	9	1	
187.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	14	1	
188.	SEKRETARIS	12	1	
189.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
190.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	9	1	
191.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
192.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERBENIHAN	11	1	
193.	KEPALA BIDANG PRODUKSI	11	1	
194.	KEPALA BIDANG USAHA DAN PENYULUHAN	11	1	
195.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN	11	1	
196.	KEPALA SEKSI PENYIAPAN DAN PEMANFAATAN LAHAN	9	1	
197.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN AREAL	9	1	
198.	KEPALA SEKSI PERBENIHAN	8	1	
199.	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI DAN BUDIDAYA	9	1	
200.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	9	1	
201.	KEPALA SEKSI ALAT DAN MESIN	9	1	
202.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN GANGGUAN USAHA	8	1	
203.	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	9	1	

204.	KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	1	
205.	KEPALA SEKSI PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)	9	1	
206.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN	9	1	
207.	KEPALA SEKSI SARANA PERLINDUNGAN	9	0	
208.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	14	1	
209.	SEKRETARIS	12	0	
210.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	0	
211.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	9	1	
212.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
213.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	1	
214.	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11	1	
215.	KEPALA BIDANG USAHA DAN PENYULUHAN	11	1	
216.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA	11	1	
217.	KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN	9	1	
218.	KEPALA SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA	9	1	
219.	KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN	8	1	
220.	KEPALA SEKSI PERBIBITAN TERNAK	8	1	
221.	KEPALA SEKSI BUDIDAYA TERNAK	9	1	
222.	KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9	1	
223.	KEPALA SEKSI USAHA DAN KEMITRAAN	9	1	
224.	KEPALA SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	9	1	
225.	KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	1	
226.	KEPALA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	9	1	
227.	KEPALA SEKSI PUPUK DAN PESTISIDA	9	1	
228.	KEPALA SEKSI ALAT, MESIN DAN SARANA USAHA	9	1	
229.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	1	
230.	SEKRETARIS	12	1	
231.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
232.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	9	1	

233.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	8	1	
234.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	1	
235.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	1	
236.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	0	
237.	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	1	
238.	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	8	0	
239.	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	8	1	
240.	KEPALA SEKSI PENDATAAN PENDUDUK	9	1	
241.	KEPALA SEKSI KELAHIRAN	8	1	
242.	KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	8	1	
243.	KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, KEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	8	0	
244.	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	9	0	
245.	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9	1	
246.	KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	1	
247.	KEPALA SEKSI KERJASAMA	9	1	
248.	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	8	0	
249.	KEPALA SEKSI INOVASI PELAYANAN	9	1	
250.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	14	1	
251.	SEKRETARIS	12	1	
252.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
253.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
254.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	0	
255.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	11	1	
256.	KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	11	0	
257.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN	11	1	

	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA			
258.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	11	1	
259.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI, PROMOSI, KEMITRAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN	9	1	
260.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DESA DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8	1	
261.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DESA DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8	0	
262.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN POTENSI DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8	1	
263.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	9	1	
264.	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN TANAH DESA DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	9	0	
265.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	8	1	
266.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	9	1	
267.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	9	1	
268.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SYARAT-SYARAT KERJA DAN PENGUPAHAN	8	1	
269.	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	0	
270.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	8	1	
271.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	1	
272.	SEKRETARIS	12	1	
273.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
274.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
275.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
276.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	11	1	
277.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYA IKAN	11	1	

278.	KEPALA BIDANG PERIZINAN, PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA IKAN	11	1	
279.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN	11	1	
280.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NELAYAN KECIL	9	1	
281.	KEPALA SEKSI KEMITRAAN, AKSES INFORMASI DAN IPTEK NELAYAN KECIL	9	1	
282.	KEPALA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	9	1	
283.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBUDIDAYA IKAN	9	1	
284.	KEPALA SEKSI KEMITRAAN, AKSES INFORMASI DAN IPTEK PEMBUDIDAYA IKAN	8	1	
285.	KEPALA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMBUDIDAYA IKAN	8	1	
286.	KEPALA SEKSI PENERBITAN SIUP DAN TANDA PENCATATAN PERIKANAN	9	1	
287.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI	9	1	
288.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN SUMBER DAYA IKAN	9	1	
289.	KEPALA SEKSI DATA, INFORMASI DAN PENATAAN RUANG PEMBUDIDAYA IKAN	9	1	
290.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN IKAN	9	1	
291.	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PEMBENIHAN IKAN	9	1	
292.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14	1	
293.	SEKRETARIS	12	1	
294.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
295.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
296.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
297.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	11	1	
298.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	11	1	
299.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	11	1	
300.	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	11	1	

301.	KEPALA SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN	9	1	
302.	KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	9	1	
303.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN TAHURA	9	1	
304.	KEPALA SEKSI PENGURANGAN SAMPAH	9	1	
305.	KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH	9	1	
306.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3	9	1	
307.	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	9	1	
308.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	9	1	
309.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	9	1	
310.	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	9	1	
311.	KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	9	1	
312.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	9	1	
313.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	1	
314.	SEKRETARIS	12	1	
315.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	0	
316.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	0	
317.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
318.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	11	1	
319.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	11	1	
320.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT	11	1	
321.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL	11	1	
322.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN PERHUBUNGAN DARAT	9	1	
323.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	9	1	
324.	KEPALA SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	9	1	
325.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	8	1	
326.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS PERHUBUNGAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	8	1	
327.	KEPALA SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA ASDP	9	1	

328.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT	9	1	
329.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN	9	1	
330.	KEPALA SEKSI PELABUHAN	9	1	
331.	KEPALA SEKSI PENERTIBAN	9	1	
332.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN	9	1	
333.	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN	8	1	
334.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	14	1	
335.	SEKRETARIS	12	1	
336.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
337.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
338.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
339.	KEPALA BIDANG KETERSEDIAN DAN KERAWANAN PANGAN	11	1	
340.	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	11	1	
341.	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	11	1	
342.	KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN	11	1	
343.	KEPALA SEKSI KETERSEDIAN PANGAN;	8	0	
344.	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PANGAN	8	0	
345.	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	8	0	
346.	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	8	1	
347.	KEPALA SEKSI HARGA PANGAN	8	1	
348.	KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN	8	1	
349.	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	8	1	
350.	KEPALA SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	8	1	
351.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	8	1	
352.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	8	0	
353.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8	1	
354.	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	8	1	
355.	KEPALA DINAS PARIWISATA	14	0	
356.	SEKRETARIS	12	1	



357.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
358.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
359.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
360.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI PARIWISATA	11	1	
361.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	11	1	
362.	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	11	1	
363.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	11	1	
364.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA JASA PARIWISATA	8	1	
365.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA SARANA PARIWISATA	8	1	
366.	KEPALA SEKSI KEMITRAAN INDUSTRI PARIWISATA	9	1	
367.	KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA	8	1	
368.	KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPTEK	9	1	
369.	KEPALA SEKSI KERJASAMA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	8	1	
370.	KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA	8	1	
371.	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI PARIWISATA	8	1	
372.	KEPALA SEKSI ANALISIS PASAR PARIWISATA	9	1	
373.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	8	1	
374.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA	8	1	
375.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WISATA	8	1	
376.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	1	
377.	SEKRETARIS	12	0	
378.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
379.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
380.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
381.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	11	1	
382.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	1	
383.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI	11	0	

	INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
384.	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	11	1	
385.	KEPALA BIDANG STATISTIK	11	1	
386.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK	8	1	
387.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	8	1	
388.	KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8	1	
389.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	9	1	
390.	KEPALA SEKSI HUBUNGAN MEDIA	8	1	
391.	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	8	1	
392.	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI	9	1	
393.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	9	1	
394.	KEPALA SEKSI PERSANDIAN	8	1	
395.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	8	1	
396.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	9	1	
397.	KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	8	1	
398.	KEPALA SEKSI DATA STATISTIK SEKTORAL	9	1	
399.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL	8	1	
400.	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN DATA STATISTIK SEKTORAL	8	1	
401.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	14	1	
402.	SEKRETARIS	12	1	
403.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	9	1	
404.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
405.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	11	1	
406.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	11	1	
407.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	11	1	
408.	KEPALA SEKSI ORGANISASI	9	1	
409.	KEPALA SEKSI TATALAKSANA DAN KEANGGOTAAN	9	1	
410.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	9	1	
411.	KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI	9	1	

412.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	9	1	
413.	KEPALA SEKSI PERMODALAN DAN SIMPAN PINJAM	9	1	
414.	KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO	9	1	
415.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO	9	1	
416.	KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN	8	1	
417.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14	0	
418.	SEKRETARIS	12	1	
419.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
420.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
421.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
422.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11	1	
423.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	1	
424.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR	11	1	
425.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PROMOSI	11	1	
426.	KEPALA SEKSI USAHA INDUSTRI	9	1	
427.	KEPALA SEKSI PRODUKSI INDUSTRI	9	1	
428.	KEPALA SEKSI SARANA, PRASARANA DAN INFORMASI	9	1	
429.	KEPALA SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN	9	1	
430.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	9	1	
431.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	9	1	
432.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PASAR	9	1	
433.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PASAR	9	1	
434.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENDAPATAN PASAR	9	1	
435.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN STANDARISASI INDUSTRI	9	1	
436.	KEPALA SEKSI BINA PEDAGANG KREATIF LAPANGAN	9	1	
437.	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KEMITRAAN	9	1	
438.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	1	

439.	SEKRETARIS	12	1	
440.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
441.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
442.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
443.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	11	1	
444.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	11	1	
445.	KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SARANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG	11	1	
446.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT	11	1	
447.	KEPALA SEKSI PENATAAN,ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,KEUANGAN DAN ASET DESA	9	1	
448.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PERKEMBANGAN DESA	9	1	
449.	KEPALA SEKSI KERJASAMA DESA	9	1	
450.	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA	8	1	
451.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DESA DAN JARINGAN PEMASARAN	8	1	
452.	KEPALA SEKSI TATA KELOLA EKONOMI, PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	9	1	
453.	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA ALAM, RAHABILITASI DAN KONSERVASI LINGKUNGAN	8	1	
454.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	9	1	
455.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA	8	1	
456.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, ADAT ISTIADAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	9	1	
457.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT	8	1	
458.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT	8	1	
459.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	14	1	

	DAN PERLINDUNGAN ANAK			
460.	SEKRETARIS	12	1	
461.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
462.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
463.	KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI	11	1	
464.	KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	11	1	
465.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	11	1	
466.	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI	9	1	
467.	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM	9	1	
468.	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA BIDANG KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI	9	1	
469.	KEPALA SEKSI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	9	1	
470.	KEPALA SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI	9	1	
471.	KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	9	1	
472.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	9	1	
473.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	9	1	
474.	KEPALA SEKSI DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	9	1	
475.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	1	
476.	SEKRETARIS	12	1	
477.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
478.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
479.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGGERAKAN DAN	11	1	

	PENYULUHAN			
480.	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA	11	1	
481.	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	11	1	
482.	KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN	9	1	
483.	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB	9	1	
484.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA	8	1	
485.	KEPALA SEKSI DISTRIUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI	9	1	
486.	KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB	9	1	
487.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN KESERTAAN KB	9	1	
488.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA	9	0	
489.	KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN BALITA, ANAK DAN LANSIA	9	1	
490.	KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA	9	0	
491.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	14	1	
492.	SEKRETARIS	12	1	
493.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
494.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
495.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
496.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	1	
497.	KEPALA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN	11	1	
498.	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	11	1	
499.	KEPALA BIDANG TEKNIS	11	1	
500.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	1	
501.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	1	
502.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	1	
503.	KEPALA SEKSI BINA TEKNIS	8	1	
504.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SARANA AIR	9	1	

	BERSIH			
505.	KEPALA SEKSI BANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEHATAN	9	1	
506.	KEPALA SEKSI KEBERSIHAN	8	1	
507.	KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	8	1	
508.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	9	1	
509.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	9	1	
510.	KEPALA SEKSI INVENTARISASI DAN PELAPORAN	9	1	
511.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14	0	
512.	SEKRETARIS	12	1	
513.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
514.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
515.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
516.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	11	1	
517.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN DAN PEMANFAATAN KEARSIPAN	11	1	
518.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	11	1	
519.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN & PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	11	1	
520.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN	8	1	
521.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SDM KEARSIPAN	8	1	
522.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	8	1	
523.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	8	1	
524.	KEPALA SEKSI PRESERVASI, PELAYANAN, PEMANFAATAN DAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN	8	1	
525.	KEPALA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN ARSIP STATIS	8	1	
526.	KEPALA SEKSI LAYANAN OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN	8	1	
527.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	8	1	
528.	KEPALA SEKSI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	8	1	
529.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA	8	1	

	PERPUSTAKAAN			
530.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	8	1	
531.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	8	1	
532.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14	1	
533.	SEKRETARIS	12	1	
534.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
535.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
536.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
537.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	11	1	
538.	KEPALA BIDANG KEWIRAUSAHAAN KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN	11	1	
539.	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	11	1	
540.	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASIOLAHRAGA	11	1	
541.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KREATIVITAS PEMUDA	8	1	
542.	KEPALA SEKSI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	8	1	
543.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN IMAN TAQWA PEMUDA	8	1	
544.	KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	8	1	
545.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEPRAMUKAAN DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	8	1	
546.	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN SARANA PRASARANA PEMUDA	8	1	
547.	KEPALA SEKSI PEMBUDAYAAN DAN INDUSTRI OLAHRAGA	9	1	
548.	KEPALA SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI	8	1	
549.	KEPALA SEKSI PEMBIBITAN DAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI OLAHRAGA	8	1	
550.	KEPALA SEKSI OLAHRAGA PRESTASI	9	1	
551.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAAGAN	9	1	
552.	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA	8	1	



553.	KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	14	1	
554.	SEKRETARIS	12	1	
555.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
556.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
557.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
558.	KEPALA BIDANG TATA RUANG	11	1	
559.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	11	1	
560.	KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN DAN PENGUATAN HAK ATAS TANAH DAERAH	11	1	
561.	KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH	11	1	
562.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	9	1	
563.	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	9	1	
564.	KEPALA SEKSI PEMETAAN TATA RUANG	9	1	
565.	KEPALA SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	8	1	
566.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	8	1	
567.	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN	8	1	
568.	KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN TANAH	9	1	
569.	KEPALA SEKSI DATA DAN PEMETAAN TEMATIK	9	1	
570.	KEPALA SEKSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH	8	1	
571.	KEPALA SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN	9	0	
572.	KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGENDALIAN SENGKETA PERTANAHAN	9	1	
573.	KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERTANAHAN	9	1	
574.	KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	14	1	
575.	SEKRETARIS	12	1	
576.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	9	1	
577.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
578.	KEPALA BIDANG PANAS BUMI DAN MIGAS	11	0	
579.	KEPALA BIDANG GEOLOGI	11	1	

580.	KEPALA BIDANG ENERGI	11	1	
581.	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN BIMBINGAN USAHA PANAS BUMI	9	1	
582.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, INVENTARISASI DAN EVALUASI PANAS BUMI	9	1	
583.	KEPALA SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI	9	0	
584.	KEPALA SEKSI INVENTARISASI AIR TANAH	9	1	
585.	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN AIR TANAH	8	1	
586.	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI GEOLOGI	9	1	
587.	KEPALA SEKSI INVENTARISASI ENERGI	9	1	
588.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI	8	1	
589.	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN ENERGI	8	1	
590.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	1	
591.	SEKRETARIS	12	1	
592.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
593.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
594.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
595.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH	11	1	
596.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN	11	1	
597.	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	11	1	
598.	KEPALA BIDANG INOVASI DAERAH	11	1	
599.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN	9	1	
600.	KEPALA SUB BIDANG APARATUR	9	1	
601.	KEPALA SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9	1	
602.	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA	9	1	
603.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1	
604.	KEPALA SUB BIDANG SEJARAH DAN KEPURBAKALAN	8	1	
605.	KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAERAH	8	1	
606.	KEPALA SUB BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9	1	
607.	KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	8	1	
608.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN SDM	8	1	

	INOVASI DAERAH			
609.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH	9	1	
610.	KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN INOVASI DAERAH	9	1	
611.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14	0	
612.	SEKRETARIS	12	1	
613.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
614.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
615.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
616.	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	11	1	
617.	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	11	1	
618.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	11	1	
619.	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	11	1	
620.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN	9	0	
621.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	8	0	
622.	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PROFESI ASN	8	1	
623.	KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN	9	1	
624.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI	8	0	
625.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER DAN PROMOSI	9	1	
626.	KEPALA SUB BIDANG PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI	9	1	
627.	KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	9	0	
628.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI	9	0	
629.	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR ADMINISTRASI	9	1	
630.	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR FUNGSIONAL	9	1	
631.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN	9	1	
632.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	1	

633.	SEKRETARIS	12	1	
634.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
635.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
636.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
637.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	0	
638.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	1	
639.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	11	1	
640.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH	11	1	
641.	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	9	1	
642.	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN	8	1	
643.	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BELANJA LANGSUNG	8	1	
644.	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	8	1	
645.	KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH	9	1	
646.	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN BELANJA	9	1	
647.	KEPALA SUB BIDANG LAPORAN KEUANGAN	9	1	
648.	KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI ASET	8	1	
649.	KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN	9	1	
650.	KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET	8	1	
651.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	14	1	
652.	SEKRETARIS	12	1	
653.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
654.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
655.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
656.	KEPALA BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	11	1	
657.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN	11	1	
658.	KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	11	1	
659.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN	11	0	

660.	KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	9	1	
661.	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN	9	1	
662.	KEPALA SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN	8	1	
663.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK	9	1	
664.	KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK	8	1	
665.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN NON PAJAK	8	1	
666.	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH	8	1	
667.	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI BENDA/SURAT BERHARGA	8	1	
668.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	8	0	
669.	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN	9	1	
670.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN	9	1	
671.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN	9	1	
672.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14	1	
673.	SEKRETARIS	12	1	
674.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	9	1	
675.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	9	1	
676.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	0	
677.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	11	1	
678.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	11	1	
679.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	11	1	
680.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	11	1	
681.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM	9	1	
682.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA	9	1	

683.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN EKONOMI REGIONAL DAN KEUANGAN DAERAH	9	1	
684.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	9	1	
685.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	1	
686.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	9	1	
687.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	9	1	
688.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG DAN PEMUKIMAN	9	1	
689.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	9	1	
690.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	1	
691.	KEPALA SUB BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	1	
692.	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	9	1	
693.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	1	
694.	SEKRETARIS	12	1	
695.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
696.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	9	1	
697.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
698.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	11	1	
699.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	11	1	
700.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	11	1	
701.	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	11	1	
702.	KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN	8	1	
703.	KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN	9	1	
704.	KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN	8	1	
705.	KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK	8	1	

706.	KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI	8	1	
707.	KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI	8	1	
708.	KEPALA SUB BIDANG OPERASIONAL	8	1	
709.	KEPALA SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA	8	1	
710.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	1	
711.	SEKRETARIS	12	1	
712.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1	
713.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	8	0	
714.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	1	
715.	KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	11	1	
716.	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	11	1	
717.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	11	1	
718.	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN	9	1	
719.	KEPALA SUB BIDANG PEMBAURAN KEWARGANEGARAAN	9	1	
720.	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI	9	1	
721.	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA	9	1	
722.	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9	1	
723.	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PARPOL DAN PEMILU	9	1	
724.	KEPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	1	
725.	SEKRETARIS	12	1	
726.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN	8	1	
727.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	8	1	
728.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
729.	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	11	1	
730.	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	1	
731.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR	11	1	
732.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	1	
733.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	9	1	

734.	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	9	1	
735.	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM	9	1	
736.	KEPALA SEKSI KERJASAMA	9	1	
737.	KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR	9	1	
738.	KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL	8	1	
739.	KEPALA SEKSI SATUAN LINMAS	9	1	
740.	KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT	9	1	
741.	DIREKTURRSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT TENGGARONG	14	0	
742.	WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN	12	1	
743.	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	12	1	
744.	KEPALA BAGIAN UMUM	11	1	
745.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	1	
746.	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN	11	0	
747.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS	11	1	
748.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	11	1	
749.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	11	1	
750.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA	9	1	
751.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	9	1	
752.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS	9	0	
753.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN	9	1	
754.	KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN MOBILISASI DANA	9	1	
755.	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI	9	1	
756.	KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN RS DAN PEMASARAN	8	1	
757.	KEPALA SUB BAGIAN DIKLIT DAN KERJASAMA	9	1	
758.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1	
759.	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	8	1	
760.	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS NON RAWAT INAP	8	1	
761.	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	8	1	
762.	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN NON RAWAT INAP	8	1	



763.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	9	1	
764.	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	8	1	
765.	DIREKTURRSUD BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA	14	1	
766.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	1	
767.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, HUKUM DAN HUMAS	11	1	
768.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	11	1	
769.	KEPALA BIDANG PENUNJANG PELAYANAN	11	1	
770.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
771.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	1	
772.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1	
773.	KEPALA SEKSI HUKUM DAN HUMAS	9	1	
774.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN DIKLAT	9	1	
775.	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS	9	1	
776.	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN	9	1	
777.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	9	1	
778.	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	9	1	
779.	DIREKTURRSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN	14	1	
780.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	1	
781.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, HUKUM DAN HUMAS	11	1	
782.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	11	0	
783.	KEPALA BIDANG PENUNJANG PELAYANAN	11	1	
784.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
785.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	1	
786.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	8	1	
787.	KEPALA SEKSI HUKUM DAN HUMAS	9	0	
788.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN DIKLAT	9	1	
789.	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS	9	1	
790.	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN	8	1	
791.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	8	1	
792.	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	8	1	
793.	SEKRETARIS KORPRI	12	1	

794.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA	8	1	
795.	KEPALA SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI	8	1	
796.	KEPALA SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL	8	1	
797.	CAMAT ANGGANA	12	1	
798.	SEKRETARIS CAMAT	11	0	
799.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
800.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
801.	KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN	9	1	
802.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	9	1	
803.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
804.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
805.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
806.	CAMAT MARANG KAYU	12	1	
807.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
808.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	0	
809.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
810.	KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN	8	1	
811.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
812.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	0	
813.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
814.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
815.	CAMAT MUARA BADAK	12	1	
816.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
817.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
818.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
819.	KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN	8	1	
820.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	

821.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
822.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
823.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
824.	CAMAT SANGA - SANGA	12	1	
825.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
826.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
827.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
828.	KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN	9	1	
829.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
830.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	0	
831.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
832.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	0	
833.	CAMAT SAMBOJA	12	1	
834.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
835.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
836.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
837.	KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN	8	1	
838.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
839.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
840.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
841.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
842.	CAMAT MUARA JAWA	12	1	
843.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
844.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
845.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
846.	KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN	8	1	
847.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
848.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	

849.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	0	
850.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
851.	CAMAT LOA KULU	12	1	
852.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
853.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
854.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
855.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	9	1	
856.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	9	0	
857.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
858.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
859.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
860.	CAMAT LOA JANAN	12	1	
861.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
862.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
863.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
864.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
865.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
866.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
867.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
868.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
869.	CAMAT TENGGARONG	12	1	
870.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
871.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
872.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
873.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
874.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
875.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	0	
876.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1	

	DESA			
877.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
878.	CAMAT TENGGARONG SEBERANG	12	0	
879.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
880.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
881.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
882.	KEPALA SEKSI KEPEREMINTAHAN	9	1	
883.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
884.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
885.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
886.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
887.	CAMAT SEBULU	12	0	
888.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
889.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
890.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
891.	KEPALA SEKSI KEPEREMINTAHAN	8	1	
892.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	9	1	
893.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	0	
894.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
895.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
896.	CAMAT MUARA KAMAN	12	1	
897.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
898.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
899.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
900.	KEPALA SEKSI KEPEREMINTAHAN	8	1	
901.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
902.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
903.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	

904.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
905.	CAMAT KOTA BANGUN	12	1	
906.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
907.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
908.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
909.	KEPALA SEKSI KEPemerintahan	8	1	
910.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	0	
911.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
912.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
913.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
914.	CAMAT MUARA WIS	12	1	
915.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
916.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
917.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
918.	KEPALA SEKSI KEPemerintahan	8	1	
919.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
920.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	0	
921.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	9	1	
922.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
923.	CAMAT MUARA MUNTAI	12	1	
924.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
925.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	1	
926.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
927.	KEPALA SEKSI KEPemerintahan	8	1	
928.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
929.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
930.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
931.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	

932.	CAMAT KENOHAN	12	1	
933.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
934.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	
935.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
936.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
937.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	1	
938.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
939.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
940.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
941.	CAMAT KEMBANG JANGGUT	12	1	
942.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
943.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	8	0	
944.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	0	
945.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	0	
946.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8		
947.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
948.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	0	
949.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	0	
950.	CAMAT TABANG	12	1	
951.	SEKRETARIS CAMAT	11	1	
952.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	0	
953.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	8	1	
954.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	9	1	
955.	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	9	1	
956.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1	
957.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8	1	
958.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	1	
959.	LURAH JAWA	9	1	

960.	SEKRETARIS	8	1	
961.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
962.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
963.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
964.	LURAH PENDINGIN	9	1	
965.	SEKRETARIS	8	0	
966.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
967.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	
968.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
969.	LURAH SANGA-SANGA DALAM	9	1	
970.	SEKRETARIS	8	1	
971.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
972.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
973.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	0	
974.	LURAH SARI JAYA	9	1	
975.	SEKRETARIS	8	1	
976.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
977.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
978.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
979.	LURAH SANGA-SANGA MUARA	9	1	
980.	SEKRETARIS	8	1	
981.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
982.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
983.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
984.	LURAH SOLOK API DARAT	9	1	
985.	SEKRETARIS	8	1	
986.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
987.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
988.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
989.	LURAH SOLOK API LAUT	9	1	
990.	SEKRETARIS	8	1	
991.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
992.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
993.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	



994.	LURAH AMBORAWANG LAUT	9	1	
995.	SEKRETARIS	8	1	
996.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
997.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
998.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	0	
999.	LURAH AMBORAWANG DARAT	9	1	
1000.	SEKRETARIS	8	1	
1001.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1002.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1003.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1004.	LURAH MARGO MULYO	9	1	
1005.	SEKRETARIS	8	1	
1006.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1007.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1008.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1009.	LURAH SUNGAI MERDEKA	9	1	
1010.	SEKRETARIS	8	1	
1011.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	0	
1012.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1013.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1014.	LURAH SUNGAI SELUANG	9	1	
1015.	SEKRETARIS	8	1	
1016.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1017.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1018.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1019.	LURAH WONO TIRTO	9	1	
1020.	SEKRETARIS	8	1	
1021.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1022.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1023.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1024.	LURAH TANJUNG HARAPAN	9	1	
1025.	SEKRETARIS	8	1	
1026.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1027.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	

1028.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1029.	LURAH SAMBOJA KUALA	9	1	
1030.	SEKRETARIS	8	1	
1031.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1032.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	
1033.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	0	
1034.	LURAH SANIPAH	9	1	
1035.	SEKRETARIS	8	1	
1036.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1037.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1038.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1039.	LURAH HANDIL BARU	9	1	
1040.	SEKRETARIS	8	1	
1041.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	9	1	
1042.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1043.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1044.	LURAH HANDIL BARU DARAT	9	1	
1045.	SEKRETARIS	8	1	
1046.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	0	
1047.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1048.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1049.	LURAH MUARA SEMBILANG	9	1	
1050.	SEKRETARIS	8	1	
1051.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	0	
1052.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1053.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1054.	LURAH ARGO SARI	9	1	
1055.	SEKRETARIS	8	0	
1056.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1057.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	
1058.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1059.	LURAH TELUK PEMEDAS	9	1	
1060.	SEKRETARIS	8	1	
1061.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	

1062.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1063.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1064.	LURAH BUKIT MERDEKA	9	1	
1065.	SEKRETARIS	8	1	
1066.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1067.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1068.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1069.	LURAH KARYA MERDEKA	9	1	
1070.	SEKRETARIS	8	0	
1071.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1072.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1073.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1074.	LURAH KAMPUNG LAMA	9	1	
1075.	SEKRETARIS	8	1	
1076.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	0	
1077.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1078.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	0	
1079.	LURAH MUARA JAWA ILIR	9	1	
1080.	SEKRETARIS	8	1	
1081.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1082.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	
1083.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1084.	LURAH MUARA JAWA TENGAH	9	1	
1085.	SEKRETARIS	8	1	
1086.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1087.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1088.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1089.	LURAH MUARA JAWA ULU	9	1	
1090.	SEKRETARIS	8	1	
1091.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1092.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1093.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1094.	LURAH TELUK DALAM	9	1	
1095.	SEKRETARIS	8	1	

1096.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1097.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	
1098.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1099.	LURAH DONDANG	9	1	
1100.	SEKRETARIS	8	1	
1101.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1102.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1103.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1104.	LURAH TAMA POLE	9	1	
1105.	SEKRETARIS	8	1	
1106.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1107.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1108.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1109.	LURAH MUARA KEMBANG	9	1	
1110.	SEKRETARIS	8	1	
1111.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1112.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1113.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1114.	LURAH MUARA JAWA PESISIR	9	1	
1115.	SEKRETARIS	8	1	
1116.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1117.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1118.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1119.	LURAH JAHAB	9	1	
1120.	SEKRETARIS	8	1	
1121.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1122.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1123.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1124.	LURAH BUKIT BIRU	9	1	
1125.	SEKRETARIS	8	1	
1126.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1127.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	0	
1128.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1129.	LURAH TIMBAU	9	1	

1130.	SEKRETARIS	8	1	
1131.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1132.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1133.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1134.	LURAH MELAYU	9	1	
1135.	SEKRETARIS	8	1	
1136.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1137.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1138.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1139.	LURAH SUKARAME	9	1	
1140.	SEKRETARIS	8	1	
1141.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1142.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1143.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1144.	LURAH KAMPUNG BARU	9	1	
1145.	SEKRETARIS	8	1	
1146.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1147.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1148.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1149.	LURAH LOA TEBU	9	1	
1150.	SEKRETARIS	8	1	
1151.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1152.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1153.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1154.	LURAH MANGKURAWANG	9	1	
1155.	SEKRETARIS	8	1	
1156.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1157.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1158.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1159.	LURAH MALUHU	9	1	
1160.	SEKRETARIS	8	1	
1161.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1162.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1163.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	

1164.	LURAH LOA IPUH	9	0	
1165.	SEKRETARIS	8	1	
1166.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1167.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1168.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1169.	LURAH LOA IPUH DARAT	9	1	
1170.	SEKRETARIS	8	1	
1171.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN	8	1	
1172.	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	8	1	
1173.	KEPALA SEKSI SOSIAL	8	1	
1174.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAERAH	9	7	
1175.	KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAERAH	8	7	
1176.	KEPALA UPT PERBENIHAN KEBUN DINAS DAN PENGOLAHAN HASIL	8	0	
1177.	KEPALA TU UPT PERBENIHAN KEBUN DINAS DAN PENGOLAHAN HASIL	9	1	
1178.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN SEBULU	8	1	
1179.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN SEBULU	8	1	
1180.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MUARA BADAH	9	0	
1181.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MUARA BADAH	8	1	
1182.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KOTA BANGUN	9	1	
1183.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KOTA BANGUN	8	1	
1184.	KEPALA UPT PROTEKSI TANAMAN DAN LABORATORIUM HAYATI	9	0	
1185.	KEPALA TU UPT PROTEKSI TANAMAN DAN LABORATORIUM HAYATI	8	1	
1186.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN LOA KULU	9	1	

1187.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN LOA KULU	8	1	
1188.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MUARA JAWA	9	1	
1189.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MUARA JAWA	8	1	
1190.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KENOHAN	9	1	
1191.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KENOHAN	8	1	
1192.	KEPALA UPT PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN	9	0	
1193.	KEPALA TU UPT PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN	8	0	
1194.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN LOA JANAN	9	1	
1195.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN LOA JANAN	8	1	
1196.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN ANGGANA	9	0	
1197.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN ANGGANA	8	1	
1198.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	9	1	
1199.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	8	1	
1200.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN TENGARONG	9	1	
1201.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN TENGARONG	8	1	
1202.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN SANGA - SANGA	9	1	

1203.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN SANGA - SANGA	8	1	
1204.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MARANG KAYU	9	0	
1205.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MARANG KAYU	8	1	
1206.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN TABANG	9	1	
1207.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN TABANG	8	1	
1208.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	9	0	
1209.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	8	0	
1210.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN SAMBOJA	9	1	
1211.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN SAMBOJA	8	1	
1212.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MUARA KAMAN	9	1	
1213.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN MUARA KAMAN	8	1	
1214.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KEMBANG MUARA MUNTAI	9	1	
1215.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KEMBANG MUARA MUNTAI	8	1	
1216.	KEPALA UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KEMBANG MUARA WIS	9	1	
1217.	KEPALA TU UPT PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN KEMBANG	8	1	



	MUARA WIS			
1218.	KEPALA UPT PKB	9	1	
1219.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPT PKB	8	1	
1220.	KEPALA UPT PERALATAN DAN LABORATORIUM	9	1	
1221.	KEPALA TATA USAHA UPT PERALATAN DAN LABORATORIUM	8	0	
1222.	KEPALA UPT PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	1	
1223.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	8	1	
1224.	KEPALA UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	1	
1225.	KEPALA TATA USAHA UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	1	
1226.	KEPALA UPTD GUDANG FARMASI	9	1	
1227.	KEPALA TATA USAHA UPTD GUDANG FARMASI	8	0	
1228.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGA-SANGA	9	1	
1229.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SANGA-SANGA	8	1	
1230.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMBOJA	9	1	
1231.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SAMBOJA	8	1	
1232.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI MERDEKA	9	1	
1233.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SUNGAI MERDEKA	8	1	
1234.	KEPALA UPTD PUSKESMAS BATUAH	9	1	
1235.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BATUAH	8	1	
1236.	KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTA BANGUN	9	1	
1237.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KOTA BANGUN	8	1	
1238.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKURAWANG	9	1	
1239.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MANGKURAWANG	8	1	
1240.	KEPALA UPTD LABKESDA DAN ELEKTROMEDIK	9	1	
1241.	KEPALA TATA USAHA UPTD LABKESDA DAN ELEKTROMEDIK	8	1	
1242.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA WIS	9	1	
1243.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MUARA WIS	8	1	
1244.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SEBULU I	9	1	

1245.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SEBULU I	8	1	
1246.	KEPALA UPTD PUSKESMAS TABANG	9	1	
1247.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS TABANG	8	0	
1248.	KEPALA UPTD PUSKESMAS HANDIL BARU	9	1	
1249.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS HANDIL BARU	8	1	
1250.	KEPALA UPTD PUSKESMAS LOA DURI	9	1	
1251.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS LOA DURI	8	0	
1252.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU	9	1	
1253.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU	8	1	
1254.	KEPALA UPTD PUSKESMAS RAPAK MAHANG	9	1	
1255.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RAPAK MAHANG	8	1	
1256.	KEPALA UPTD PUSKESMAS PERANGAT	9	1	
1257.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS PERANGAT	8	1	
1258.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SEBULU II	9	1	
1259.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SEBULU II	8	1	
1260.	KEPALA UPTD PUSKESMAS TELUK DALAM	9	1	
1261.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS TELUK DALAM	8	1	
1262.	KEPALA UPTD PUSKESMAS JONGGON JAYA	9	1	
1263.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS JONGGON JAYA	8	1	
1264.	KEPALA UPTD PUSKESMAS LOA IPUH	9	1	
1265.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS LOA IPUH	8	1	
1266.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA BADAQ	9	1	
1267.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MUARA BADAQ	8	1	
1268.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA KAMAN	9	1	
1269.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MUARA KAMAN	8	1	
1270.	KEPALA UPTD PUSKESMAS RIMBA AYU	9	1	
1271.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RIMBA AYU	8	1	
1272.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SEPARI	9	1	
1273.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SEPARI	8	1	
1274.	KEPALA UPTD PUSKESMAS BUNGA JADI	9	1	
1275.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BUNGA JADI	8	1	
1276.	KEPALA UPTD PUSKESMAS KAHALA	9	1	

1277.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KAHALA	8	1	
1278.	KEPALA UPTD PUSKESMAS LOA JANAN	9		
1279.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS LOA JANAN	8	1	
1280.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA JAWA	9	1	
1281.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MUARA JAWA	8	1	
1282.	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA MUNTAI	9	1	
1283.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MUARA MUNTAI	8	1	
1284.	KEPALA UPTD PUSKESMAS RITAN	9	1	
1285.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RITAN	8	1	
1286.	KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI MERIAM	9	1	
1287.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SUNGAI MERIAM	8	1	
1288.	KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAK BARU	9	1	
1289.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BADAK BARU	8	1	
1290.	KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMBANG JANGGUT	9	0	
1291.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KEMBANG JANGGUT	8	1	
1292.	KEPALA UPTD PUSKESMAS LOA KULU	9	1	
1293.	KEPALA TATA USAHA UPTD PUSKESMAS LOA KULU	8	1	
1294.	KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH I	9	0	
1295.	KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH I	8	0	
1296.	KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH V	9	0	
1297.	KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH V	8	0	
1298.	KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH II	9	0	
1299.	KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH II	8	0	
1300.	KEPALA UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN	9	0	

1301.	KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN	8	0	
1302.	KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH III	9	0	
1303.	KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH III	8	0	
1304.	KEPALA UPTD PEMBENIHAN TANAMAN HORTIKULTURA	9	0	
1305.	KEPALA TATA USAHA UPTD PEMBENIHAN TANAMAN HORTIKULTURA	8	0	
1306.	KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH IV	9	0	
1307.	KEPALA TATA USAHA UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER WILAYAH IV	8	0	
1308.	KEPALA UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	0	
1309.	KEPALA TATA USAHA UPTD PEMBENIHAN TANAMAN HORTIKULTURA	8	0	
1310.	KEPALA UPTD PEMBIBITAN SAPI POTONG	9	0	
1311.	KEPALA TATA USAHA UPTD PEMBIBITAN SAPI POTONG	8	0	
1312.	KEPALA UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN	9	0	
1313.	KEPALA TATA USAHA UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN	8	0	
1314.	KEPALA UPTD. PENGELOLAAN KOMPLEK OLAHRAGA	9	0	
1315.	KEPALA TATA USAHA UPTD. PENGELOLAAN KOMPLEK OLAHRAGA	8	0	
1316.	KEPALA UPTD. PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (PPLPD)	9	0	
1317.	KEPALA TATA USAHA UPTD. PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (PPLPD)	8	1	

III. NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAN PEGAWAI

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSEDIAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH				
1.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	1	
2.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	13	1	
3.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	1	
JABATAN PELAKSANA				
1.	PENGELOLA	6	1,697	
2.	PENGOLAH	6	779	
3.	PENGADMINISTRASI	5	991	
4.	ANALIS	7	473	
5.	KOMANDAN	5	5	
6.	PENGAWAS	7	140	
7.	SEKRETARIS	6	85	
8.	VERIFIKATOR	6	76	
9.	BENDAHARA	7	84	
10.	PRANATA	6	71	
11.	PENATA	7	64	
12.	PEMERIKSA	7	30	
13.	PENYUSUN	7	220	
14.	PENYULUH	7	12	
15.	PENGEMUDI	3	31	
16.	PETUGAS	3	98	
17.	PRAMU	1	35	
18.	PERENCANA	7	6	
19.	PENGEVALUASI	7	6	
20.	PENGEMUDI PEMADAM KEBAKARAN	5	12	

21.	OPERATOR	6	12	
22.	PENYELIDIK	7	1	
23.	PRANATA ACARA	5	1	
24.	NOTULIS	6	3	
25.	AJUDAN	6	5	
26.	PEMELIHARA	5	43	
27.	PENGEMUDI AMBULANCE	4	2	
28.	TEKNISI	5	29	
29.	BINATU	3	2	
30.	JURU	5	29	
31.	PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM	5	6	
32.	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5	4	
33.	PENYIDIK	7	2	
34.	PENGENDALI	7	1	
35.	PENELAAH	7	26	
36.	PRANATA JAMUAN	5	3	
37.	JURNALIS	6	4	
38.	PERANCANG	7	1	
39.	ASISTEN	6	1	
40.	PEMANDU	5	6	
41.	FASILITATOR	7	2	
42.	PRAMU BENIH IKAN	3	3	
43.	PENGAMAT	7	5	
44.	PENGUJI	7	3	
45.	PEMBINA	7	3	
46.	TEKNISI PEMBENTUKAN KARAKTER	6	2	
47.	PENGEMBANG	7	2	
48.	PENKKAJI	7	1	

JABATAN FUNGSIONAL				
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA	11	0	
2.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	9	6	
3.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	8	2	
4.	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL	7	1	
5.	ASSESOR SDM APARATUR MADYA	11	1	
6.	ASSESOR SDM APARATUR MUDA	9	2	
7.	ASSESOR SDM APARATUR PERTAMA	8	0	
8.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	0	
9.	SANITARIAN AHLI PERTAMA	8	0	
10.	SANITARIAN PELAKSANA	6	3	
11.	SANITARIAN AHLI MUDA	9	0	
12.	SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	1	
13.	DOKTER AHLI MUDA	9	8	
14.	DOKTER AHLI PERTAMA	9	3	
15.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	8	6	
16.	DOKTER GIGI AHLI MUDA	8	0	
17.	PERAWAT TERAMPIL	8	62	
18.	PERAWAT MAHIR	7	10	
19.	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	2	
20.	PERAWAT GIGI TERAMPIL	8	3	
21.	BIDAN AHLI PERTAMA	8	1	
22.	BIDAN PELAKSANA	6	54	
23.	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	3	
24.	APOTEKER AHLI MADYA	11	1	
25.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	8	
26.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	0	
27.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	6	

28.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA	6	0	
29.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	8	0	
30.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	7	0	
31.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	1	
32.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	0	
33.	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	1	
34.	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7	1	
35.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	8	0	
36.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	0	
37.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	7	0	
38.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	7	5	
39.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	4	
40.	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8	0	
41.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	0	
42.	ARSIPARIS MUDA	9	1	
43.	ARSIPARIS PELAKSANA	6	4	
44.	PUSTAKAWAN MUDA	9	2	
45.	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2	
46.	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6	11	
47.	PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA	11	0	
48.	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	9	0	
49.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	8	0	
50.	PENERA AHLI MADYA	11	1	
51.	PENERA TERAMPIL	7	3	
52.	PENGAMAT TERA TERAMPIL	7	2	
53.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA	9	1	
54.	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	11	1	
55.	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	1	



56.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA / TERAMPIL	6	2	
57.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA	13	0	
58.	PENYULUH PERTANIAN MADYA	11	42	
59.	PENYULUH PERTANIAN MUDA	9	40	
60.	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	8	22	
61.	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	10	
62.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2	
63.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	6	8	
64.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	5	11	
65.	MEDIK VETERINER MADYA	11	0	
66.	MEDIK VETERINER MUDA	9	0	
67.	MEDIK VETERINER PERTAMA	8	0	
68.	PARAMEDIK VETERINER MADYA	11	0	
69.	PARAMEDIK VETERINER MUDA	9	0	
70.	PARAMEDIK VETERINER PERTAMA	8	0	
71.	PARAMEDIK VETERINER MAHIR	7	0	
72.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	7	0	
73.	PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA	8	0	
74.	PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA	8	0	
75.	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PERTAMA	8	0	
76.	GURU KELAS (SD)	8	3315	
77.	GURU PENDIDIKAN AGAMA (SD)	8	343	
78.	GURU PENJASKES (SD)	8	248	
79.	GURU PENDIDIKAN AGAMA (SMP)	8	102	
80.	GURU BAHASA INDONESIA (SMP)	8	152	
81.	GURU BAHASA INGGRIS (SMP)	8	118	
82.	GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (SMP)	8	26	

83.	GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (SMP)	8	168	
84.	GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (SMP)	8	159	
85.	GURU MATEMATIKA (SMP)	8	134	
86.	GURU PENJASKES (SMP)	8	73	
87.	GURU PPKN (SMP)	8	97	
88.	GURU PRAKARYA (SMP)	8	26	
89.	GURU SENI BUDAYA (SMP)	8	58	
90.	GURU T I K (SMP)	8	15	
91.	MEDIATOR PERTAMA	8	1	
92.	MEDIATOR MUDA	9	2	
93.	PENGANTAR KERJA MUDA	9	3	
94.	AUDITOR AHLI UTAMA	13	0	
95.	AUDITOR AHLI MADYA	11	6	
96.	AUDITOR AHLI MUDA	9	19	
97.	AUDITOR AHLI PERTAMA/TERAMPIL	8	3	
98.	PENGAWAS PEMERINTAH UTAMA	13	0	
99.	PENGAWAS PEMERINTAH MADYA	11	11	
100.	PENGAWAS PEMERINTAH MUDA	9	11	
101.	PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA	8	2	
102.	AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA	11	1	
103.	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	9	0	
104.	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	0	
105.	PERAWAT TERAMPIL	6	10	
106.	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	3	
107.	PERAWAT GIGI TERAMPIL	8	1	
108.	BIDAN AHLI PERTAMA	8	1	
109.	BIDAN PELAKSANA	6	6	
110.	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	1	

111.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	1	
112.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	0	
113.	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6	1	
114.	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA	6	0	
115.	TERAPIS WICARA PELAKSANA	6	0	
116.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	8	0	
117.	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	1	
118.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	3	
119.	ASISTEN PENATA ANESTESI PELAKSANA	6	0	
120.	TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA	6	0	
121.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	0	
122.	SANITARIAN PELAKSANA	6	0	
123.	DOKTER AHLI PERTAMA	9	1	
124.	PSIKOLOGI KLINIS AHLI PERTAMA	8	0	
125.	PERAWAT TERAMPIL	6	4	
126.	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	2	
127.	PERAWAT AHLI MADYA	11	0	
128.	BIDAN PENYELIA	8	0	
129.	BIDAN AHLI MUDA	11	0	
130.	BIDAN PELAKSANA	6	0	
131.	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	0	
132.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	0	
133.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERTAMA	9	1	
134.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	0	
135.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	0	
136.	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	0	
137.	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6	0	
138.	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA	6	0	

139.	TERAPIS WICARA PELAKSANA	6	0	
140.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	0	
141.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	8	0	
142.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8	0	
143.	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	0	
144.	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	1	
145.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	3	
146.	FISIKAWAN MEDIK AHLI PERTAMA	8	0	
147.	ASISTEN PENATA ANESTESI PELAKSANA	6	0	
148.	SANITARIAN PELAKSANA	6	0	
149.	DOKTER AHLI PERTAMA	9	0	
150.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	0	
151.	PERAWAT TERAMPIL	7	0	
152.	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	0	
153.	PERAWAT GIGI TERAMPIL	7		
154.	BIDAN PELAKSANA	6	0	
155.	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	0	
156.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	0	
157.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	0	
158.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	0	
159.	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	0	
160.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	0	
161.	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	0	
162.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	8	0	
163.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	0	
164.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	7	0	
165.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA PERTAMA	8	20	
166.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA MUDA	9	9	

167.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA MADYA	11	0	
168.	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1	
169.	PERENCANA AHLI MUDA	9	3	
170.	PERENCANA AHLI MADYA	11	1	
171.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	9	1	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  
  
EDI DAMANSYAH